

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara multi etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang paling kaya. Ada enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat Indonesia dan diakui oleh negara. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan ribuan suku, bahasa dan kepercayaan lokal. Dilansir dari laman Indonesia.go.id, Selasa (31/1/2023), menurut data sensus yang dicatat oleh BPS tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air. Keragaman bukan hanya menjadi sebuah anugerah bagi Indonesia, melainkan juga menjadi sebuah tantangan.

Realitas masyarakat yang multikultural seperti realitas di Indonesia, menyimpan potensi konflik yang dapat meledak setiap saat (Dewantara, 2015, hlm. 115). Pemahaman akan nilai-nilai agama yang keliru, dan ekstrimisme golongan menjadi sebab konflik pada masyarakat Indonesia yang heterogen. Fenomena perilaku, ekstrimisme dan intoleransi yang berujung pada perilaku terorisme sering terjadi di Indonesia. Perilaku terorisme sering dikaitkan dengan Islam. Padahal perilaku tersebut sama sekali tidak menggambarkan Islam. Islam yang dirisalahkan oleh Nabi Muhammad merupakan Islam yang mengajarkan kasih sayang pada semua makhluk (Nur, 2017, hlm. 21)

Di sisi lain, berkembang juga ideologi-ideologi liberal yang masuk dalam praktik keagamaan di Indonesia. Ideologi liberal yang berasal dari barat mengancam moral dan budaya ke-timuran. Islam menjadi agama yang liberal, tidak memiliki batasan, dan tidak terkontrol. Untuk menganggulangi dua arus besar ideologi di atas, pemerintah Indonesia mewacanakan Islam moderat (Moderasi Beragama) (Mudawinun, 2018, hlm. 1).

Istilah Islam moderat relevan dengan istilah “Islam Wasatīyyah” yang bersumber dari Al-Qur`ān seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 143 . Allāh swt. berfirman (As-Shalabiy, 2007, hlm. 16–25):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allāh. Dan Allāh tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allāh Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*Al-Wasatiyyah Al-Islamiyyah*”. Moderasi Islam merupakan sebuah pendekatan serta sikap yang selalu berupaya untuk mempertahankan posisi tengah di antara dua sikap esktrēm yang saling bertentangan, sehingga sikap atau pikiran seseorang tidak didominasi dari kedua sikap esktrēm tersebut. Seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang bersebrangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya (Amin, 2014, hlm. 24). Pemahaman yang moderat akan senantiasa menjaga keseimbangan, kearifan, toleransi serta cinta damai.

Meskipun wacana tentang moderasi beragama sudah sejak dahulu berkembang, namun hal tersebut terus dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah moderasi beragama. Tahun 2019 merupakan awal puncak momentum penguatan moderasi beragama. Lukman Hakim Saifuddin yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama menetapkan moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data untuk kemudian disosialisasikan, diejawantahkan dalam program, dan dilaksanakan oleh jajaran pimpinan pejabat kementerian. Tanggal 18 Oktober 2019, Puslitbang Binas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI meluncurkan buku “Moderasi Beragama”. Buku tersebut menjadi rujukan terkait moderasi beragama di Indonesia.

Program moderasi beragama dari Kemenag berupaya untuk mempromosikan pemahaman agama yang seimbang, bukan ekstremis atau liberal. Untuk menumbuhkan sikap tersebut, sekolah merupakan tempat yang strategis. Nilai-nilai moderasi beragama dapat ditanamkan kepada siswa melalui proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa diharapkan terbentuk menjadi individu muslim yang memiliki sikap moderat, yaitu mereka yang taat pada ajaran agama, memiliki sikap yang demokratis dan toleran, bertindak adil, menghargai sesama, menolak kekerasan, dan sebagainya.

Hal di atas selaras dengan tujuan ideal dari Pendidikan nasional. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan “Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Terdapat beberapa nilai pendidikan karakter yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003, diantaranya nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integeritas. Dapat disimpulkan pendidikan yang ideal harus membentuk peserta didik yang bertakwa dan mencintai tanah air. Pendidikan harus berperan menjadi alat untuk memperkenalkan dan menanamkan pemahaman tentang moderasi beragama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan berbangsa.

Pendidikan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai egaliter sesama manusia tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Sejatinya perbedaan adalah anugerah agar manusia saling mengenal. Seperti yang tertulis di dalam QS. Al-Ḥujurāt/49: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allāh ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allāh Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Menurut Goodlad (1984), ahli pendidikan Kanada, pendidikan memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan personal, adalah pendidikan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dalam hal vokasi, sosial, intelektual, dan personal. Kedua, tujuan kolektif, adalah untuk memenuhi kepentingan umum atau kolektivitas tertentu seperti negara. Pendidikan dalam konteks kolektif, seperti yang diungkapkan oleh Thomas F. Green, bertujuan untuk memenuhi dua tujuan utama. Pertama, membangun kewarganegaraan melalui proses sosialisasi, transmisi kebudayaan, dan pengembangan identitas individu. Kedua, untuk memberikan pendidikan kompetensi kepada warga negara dan memberikan surat pengakuan (sertifikat) yang dibutuhkan dalam administrasi publik (Suwanto, Sa'i, Maghfiroh 2022). Pendidikan moderasi beragama seharusnya hadir untuk memenuhi kepentingan membangun karakter kewarganegaraan (*citizenship*).

Akan tetapi kondisi realita saat ini cukup mengkhawatirkan. Perkembangan radikalisme di kalangan pelajar sangat mengkhawatirkan (Subagyo, 2020, hlm. 11). Mantan Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan bahwa sebagian besar pelajar di Indonesia mendukung aksi radikalisme berbasis agama. Perkataan tersebut didasari hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Lakip) pada tahun 2010 hingga 2011 yang menyatakan bahwa 52% pelajar setuju dengan aksi radikalisme dan 14,2% pelajar membenarkan serangan bom. Di Kabupaten Garut – Jawa Barat, puluhan pelajar terpapar paham Negara Islam Indonesia (NII). Pada 29 Oktober 2019, data dari kepolisian menunjukkan sekitar 600 pelajar di Kota Bandung terindikasi radikal.

Pemahaman radikal tersebut mendorong konflik berlatar belakang agama. Seperti yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021 di sebuah gereja, tepatnya Gereja Katedral Makassar dan penyerangan Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021. Kedua kasus tersebut didorong oleh pemahaman radikal dan mengatasnamakan *jihad* untuk melakukan penyerangan dan pengeboman (Shalihah, 2021, hlm. 1). Konflik berlatar agama juga disebabkan oleh sentimen keagamaan berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama dan kurangnya kedewasaan dalam beragama (Sarina, 2022, hlm. 3).

Menurut hemat peneliti realitas di atas terjadi karena gagalnya pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di diri peserta didik.

Pendidikan hanya menjadi sarana untuk transfer ilmu bukan untuk membangun manusia yang seutuhnya. Salah satu hasil penelitian mengungkapkan bahwa orang-orang yang berpaham radikal rata-rata merupakan orang yang mampu dalam finansial, berpendidikan tinggi, bahkan ada yang sudah bergelar doktor. Hal tersebut diperkuat juga dengan maraknya kasus radikalisme dan intoleransi di lembaga pendidikan.

Sikap untuk saling toleransi, menghargai, memahami, menghormati perbedaan yang ada tanpa membanding-bandingkan antara mayoritas dan minoritas perlu ada di setiap orang agar terciptanya suasana yang harmonis. Solusi dalam mengatasi tantangan yang ada di dalam masyarakat yang multikultural adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang menekankan pengembangan sikap toleransi, menghargai keragaman dengan tetap memberikan hak-hak bagi kelompok minoritas. Pendidikan menjadi sarana untuk menanamkan akhlak mulia (Sarina, 2022, hlm. 4).

Menangkal bahaya terorisme yang disebabkan oleh radikalisme agama tidak bisa hanya diselesaikan hanya melalui jalur hukum, polisi, dan pemerintah semata melainkan juga melibatkan dunia pendidikan. Penanaman nilai-nilai moderasi dapat dilakukan melalui mata Pelajaran PAI yang akan membentuk karakter moderat (Purwanto, Qowaid, Ma'rifataini, & Fauzi, 2019, hlm. 112). Sehingga diharapkan dengan teranamnya nilai-nilai moderasi di peserta didik, akan dapat mencegah bahaya pemahaman radikalisme yang berujung pada sikap terorisme.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul “Persepsi Siswa di SMAN 13 Bandung tentang Moderasi Beragama”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Persepsi Siswa di SMAN 13 Bandung tentang Moderasi Beragama”

Rumusan masalah tersebut kemudian peneliti jabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut

1.2.1 Bagaimana persepsi siswa di SMAN 13 Kota Bandung tentang moderasi beragama dalam konteks keyakinan agama?

1.2.2 Bagaimana persepsi siswa di SMAN 13 Kota Bandung tentang moderasi beragama dalam konteks pelaksanaan ibadah?

1.2.3 Bagaimana persepsi siswa di SMAN 13 Kota Bandung tentang moderasi beragama dalam konteks hubungan antar siswa di sekolah?

1.2.4 Bagaimana strategi pembelajaran PAI di SMAN 13 Kota Bandung dalam menanamkan pemahaman moderasi beragama di sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan umum dari penelitian ini adalah mengungkap bagaimana persepsi siswa SMAN 13 Bandung tentang moderasi beragama. Adapun tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui persepsi siswa di SMAN 13 Kota Bandung terhadap moderasi beragama dalam konteks keyakinan agama

1.3.2 Untuk mengetahui persepsi siswa di SMAN 13 Kota Bandung terhadap moderasi beragama dalam konteks pelaksanaan ibadah

1.3.3 Untuk mengetahui persepsi siswa di SMAN 13 Kota Bandung terhadap moderasi beragama dalam konteks hubungan antar siswa di sekolah

1.3.4 Untuk mengetahui strategi pembelajaran PAI di SMAN 13 Kota Bandung dalam menanamkan pemahaman moderasi beragama di sekolah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak lain untuk meneliti terkait moderasi beragama di lingkungan lembaga pendidikan. Bagi SMAN 13 Bandung, penelitian ini menjadi masukan, kritik, saran, dan solusi yang konstruktif.

1.4.2 Secara Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan peneliti sebagai mahasiswa dalam hal kepenulisan ilmiah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak SMAN 13 Bandung untuk mengembangkan program moderasi beragama di sekolah. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penelitian ini bermanfaat untuk melaksanakan kebijakan terkait pembinaan kehidupan di lembaga pendidikan yang dapat menjamin terlaksananya moderasi beragama.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca agar memahami tentang isi skripsi, peneliti menyajikan struktur organisasi skripsi beserta penjelasannya secara garis besar. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab II, Kajian pustaka, Bagian ini memberikan konteks yang lebih jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab III, Metode penelitian, di antaranya desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, Temuan dan pembahasan, yang terdiri atas temuan peneliti yang memaparkan segala hal yang ditentukan peneliti di lapangan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Bab V, Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi.